

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DUSUN II DESA SEMOI II KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Wahyuni¹

Abstrak

Wahyuni, Persepsi Masyarakat terhadap Program BLSM kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara. Bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dini Zulfiani S.Sos selaku dosen pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap program BLSM kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat kepada Masyarakat Miskin di Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu menggunakan beberapa teknik yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) menggunakan teknik sebagai berikut : observasi, wawancara, dokumentasi. Sehingga teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengumpulan, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan dalam Persepsi Masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara. Persepsi masyarakat yang menganggap program BLSM tidak sesuai dengan tujuan dari program yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu yang pendek kepada masyarakat penerima bantuan ini dan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu pada pelaksanaan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan masyarakat yang tidak mengambil dana bantuan dikantor pos dikarenakan pindah dan kondisi jalan yang rusak.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat dan Program BLSM

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iyusyahklis@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Intruksi Presiden No.5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM dan. Maka terbentuklah program untuk menanggulangi kemiskinan dan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan juni 2013 lalu yaitu Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang sering disebut Balsem.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau Balsem ialah merupakan program turunan dari program BLT Tahun 2008 dengan dasar pembentukan ialah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Tujuan bantuan tunai ini untuk membantu para rumah tangga miskin yang merasakan langsung dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun pada kenyataan dengan adanya program Bantuan Tunai yang diberikan kepada masyarakat Dusun II Desa Semoi II tidak membuat masyarakat menjadi antusias terhadap program pemerintah ini, namun kebalikan dari sikap yang diharapkan dimana masyarakat yang seakan tidak peduli dengan adanya program ini yang bisa dilihat pada berjalannya program tersebut di mulai dari proses pengambilan dana Bantuan pada hari yang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan dan absen atau tidak datang sama sekali untuk mengambil dana bantuan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dalam judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Faktor - Faktor apa saja yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka meningkatkan dan emngembangkan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis:
Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran bagi pemerintah dalam hal ini masyarakt Desa Semoi II dalam memberikan persepsi tentang Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2003:53) Persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, pengintrepretasikan terhadap stimulus yang diterima oleh orgasme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang intregated dalam diri individu.

Selanjutnya menurut Desiderato (Jalaluddin Rakhmat, 2009:50) Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, pengintrepretasikan, terhadap stimulus dengan indera penglihatan, pendengaran dan pengkhayatan yang diterima oleh individu-individu yang nantinya akan memberikan makna atau pemahanan kepada lingkungannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen P. Robbins (2003:160-163) antara lain pelaku persepsi, objek atau target yang dipersepsikan dan kondisi. Selanjutnya dalam buku Miftah Thoha (2007:160) proses persepsi sosial ini hanya akan melibatkan orang yang melihat atau menilai (preciever) dan orang yang dinilai atau dilihat (precieved). Kedua pihak ini mempunyai karakteristik masing-masing, karakteristik inilah yang mempengaruhi warna persepsi sosial.

Masyarakat

Menurut Auguste Comte (Basrowi, 2005:39) masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Menurut Pelly dan Menanti (Basrowi, 2005:39) mengemukakan hakikat masyarakat sebagai berikut:

- a. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang tertentu. Anggota masyarakat itu memiliki rasa persatuan dan menganggap mereka memiliki identitas sendiri.
- b. Masyarakat merupakan wadah sosialisasi dan transisi nilai dan norma dari generasi ke generasi. Dengan demikian, masyarakat adalah salah satu wujud dari kesatuan hidup sosial manusia.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia atau individu atau individu yang berupa wadah atau tempat untuk hidup bersama yang memiliki tujuan bersama yang didalamnya terdapat komunikasi, kebudayaan dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Menurut Abu Ahmadi (Basrowi, 2005:41) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai ciri-ciri: Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang, Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu dan Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Kebijakan

Menurut Ealau dan Prewit (Edi Suharto, 2008:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Menurut Titmuss (Edi Suharto, 2008:7) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada tindakan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu dan menunjuk seorang atau aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu.

Kebijakan Sosial

Menurut Magill (Edi Suharto, 2008:10) kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public-policy). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi,

komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Menurut Marshall (Edi Suharto, 2008:10) kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Menurut Edi Suharto (2007:10) kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan yang tujuannya ialah mengarah pada tujuan nasional.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Menurut Edi Suharto (2007:88) bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (social security) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang layak bagi kemanusiaan.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (dalam buku pegangan sosialisasi dan implementasi dan implementasi program-program kompensasi kebijakan penyesuaian bahan bakar minyak, 2013:28) merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tujuan dari Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini untuk membantuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilakukan oleh PT. Pos Indonesia sesuai dengan Intruksi Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor 01/Dirut/0613 Tentang Pelaksanaan Penugasan Negara PT.Pos Indonesia.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak (2013:44) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga (KK), dilengkapi dengan kode batang (*barcode*)

beserta nomor identitas Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Sasaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat social ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Besaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama empat bulan . Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli kenaikan harga akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diwajibkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai.

Menurut buku Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) (2008:11), Secara umum tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai – Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) adalah: Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat ke PT Pos Indonesia, Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia, Penandatanganan KKB oleh menteri keuangan Republik Indonesia, Pengiriman KKB ke Kantor Pos Indonesia, Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/Kelurahan, Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT-RTS, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam daftar, Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos dibantu aparat Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan jika diperlukan, Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran di kantor pos, Terhadap KKB penerima dilakukan pencocokan dengan daftar penerima (DAPEM), yang kemudian dikenal sebagai KKB Duplikat, Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni-Agustus sebesar Rp.. 300.000 dan periode September-Desember Rp.300.000. penjadwalan pembayaran setiap periode menjadi kewenangan dari PT Pos Indonesia, Jika kondisi KKB tidak memiliki identitas persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan verifikasi bukti diri yang sah (KTP,SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll), Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Deapartemen Sosial, Monitoring pelaksanaan penyaluran BLT-RTS oleh Tim Terpadu dan Pelaporan evaluasi hasil kegiatan.

Kemiskinan

Menurut Heru Nugraha (Oman Sukmana, 2005:131) bahwa kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan tentu juga politik. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan (dikuantifikasi) dalam bentuk angka-angka, seperti halnya dalam pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:365) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesenjangan atau keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kalangan pemerhati masalah kemiskinan (Oman Sukmana, 2005:132-133) telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam empat bentuk, di mana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk tersebut, yaitu antara lain: Kemiskinan absolute, Kemiskinan relative, Kemiskinan struktural dan Kemiskinan kultural.

Menurut Ellis G.P.R (Oman Sukmana, 2005:136) dimensi-dimensi kemiskinan antara lain: Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri, Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya, ukuran kuantatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif dan Kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Didalam penelitian ini definisi konsepsional dari Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terhadap Masyarakat Miskin adalah suatu proses dimana masyarakat dapat memahami atau memberikan makna terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baik melalui pengalaman dan penglihatan di Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (Satori dan Komariah 2013:39) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian kali ini adalah :

1. Persepsi Masyarakat terhadap adanya Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku antara lain:
 - a. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
 - b. Pendistribusian KPS (Kartu Perlindungan Sosial)
 - c. Proses Pencairan Dana
 - d. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Semoi II merupakan salah satu Desa dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Desa Semoi II terdiri dari 4 (empat) Dusun dan 21 (dua puluh satu) RT (Rukun Tetangga) dan dengan luas wilayah 6000 ha/m². jumlah penduduk di Desa Semoi II menurut Data Monografi tahun 2013 berjumlah 3.027 dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 1.571 jiwa dan minoritas adalah perempuan yaitu 1.501 jiwa.

Selanjutnya Desa Semoi II memiliki 866 Kepala keluarga (KK), sehingga memiliki 4 Dusun dan 21 RT (Rukun Tetangga) yang terorganisir Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Semoi II, penulis menfokuskan penelitian di salah satu Dusun dari empat Dusun yang ada di Desa Semoi II yaitu Dusun II dengan luas wilayah 2000 ha/m². Dusun II memiliki 247 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah penduduk 896 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 465 jiwa dan 431 jiwa.

Hasil Penelitian.

1. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Sosialisasi program BLSM dilaksanakan sebelum pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Pada program BLT sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2008, sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama-sama Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat penerima mengetahui adanya program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari ketua RT tempat tinggal mereka yang bekerjasama antara masing-masing dusun dengan pihak kantor Desa Semoi II. Dimana para ketua RT masing-masing mendatangi warganya yang menjadi penerima bantuan untuk mengambil uang di kantor pos sesuai hari dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa dokumen yang mendukung yaitu fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pencairan dana berlangsung.

2. Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Menurut buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Kartu Perlindungan Sosial seharusnya didistribusikan langsung oleh pihak kantor pos dengan cara mendatangi penerima Rumah Tangga Sasaran penerima bantuan tunai didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian melalui wawancara dimana masyarakat yang mendatangi pihak kantor pos untuk mengambil Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada saat pencairan dana tahap awal dan selanjutnya untuk tahap kedua masyarakat penerima bantuan sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial pada saat pencairan dana.

3. Pencairan Dana

Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 (dua) tahap penyaluran. Pihak kantor pos Kecamatan Sepaku membuat jadwal penyaluran bantuan di tiap-tiap Desa/Kelurahan termasuk Desa Semoi II. Jadwal penyaluran bantuan disampaikan oleh RT tempat tinggal masing-masing penerima bantuan serta syarat-syarat pengambilan dana di kantor pos yaitu dengan membawa fotokopi KK dan KTP. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat diketahui bahwa proses pencairan dana dilakukan oleh kantor pos kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahap pertama masyarakat hanya membawa fotokopi KK dan KTP dan tahap kedua masyarakat membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta fotokopi KK dan KTP. Fotokopi KK dan KTP dimaksudkan untuk memudahkan pihak kantor pos untuk mencocokkan daftar nama penerima bantuan dengan identitas pendukung lainnya.

4. Pelaporan Hasil Kegiatan

Bantuan langsung sementara Masyarakat merupakan salah satu program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Juni 2013. Berdasarkan hasil melalui wawancara dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat merasa bantuan bersifat sementara tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan jangka waktu pencairan dana dari tahap awal menuju tahap kedua. Namun sebagian lagi masyarakat mesnyukuri adanya program ini walau hanya sementara tapi bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk membeli beras 1 (satu) karung dan biaya transportasi mengambil dana bantuan dikantor pos.

5. Faktor pendukung dan penghambat dalam persepsi masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program BLSM ialah Masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat menanggapi adanya program bantuan tunai ini hanya bersifat sementara selain itu dimana masyarakat memandang program BLSM sebagai program BLT yang telah lalu berdasarkan pengalaman yang mereka alami saat proses pelaksanaan program BLT di tahun 2006 dan 2008 yang saat ini menjadi program BLSM 2013 serta masyarakat yang namanya telah terdaftar sebagai penerima bantuan tunai ini tidak lagi sebagai warga Desa Semoi II dengan kata lain masyarakat yang pindah tanpa mengurus surat pindah di kantor Desa Semoi II dan masih tercatat sebagai warga Desa Semoi II. Selanjutnya BLSM dimana bantuan ini menjadi suatu hal yang di jadikan bahan untuk para key informan dan informan dalam menggambarkan bagaimana BLSM itu sendiri dan hasil penelitian yang di dapat oleh penulis ialah BLSM bukan merupakan suatu program yang dapat menarik perhatian masyarakat karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan ini. Dan kemudian kondisi jalan yang rusak menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak mengambil program bantuan ini secara langsung tapi melalui ketua RT tempat mereka tinggal dengan memberikan surat kuasa dan bahkan sebagian tidak sama sekali mengambil dana bantuan tersebut dikantor pos dikarenakan kondisi jalan rusak dan menganggap uang bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan Penulis memberikan kesimpulan dari judul “Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Sementara

Masyarakat (BLSM) di Dusun II Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara” dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi program BLSM, masyarakat mengetetahu tentang adanya BLSM dan jadwal pencairan dana melalui Ketua RT setempat yang diketahui oleh Dusun, Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak sesuai dengan buku pedoman yang ada, pencairan dana berjalan lancar dan pelaporan hasil kegiatan masyarakat , seluruh rangkaian kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah dimana tujuan dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini ialah untuk masyarakat yang miskin dan rentan akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Juni 2013 lalu namun pada kenyataannya menurut hasil penelitian yakni hasil wawancara penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak merasa bantuan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan mereka.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. ialah kondisi jalan yang rusak yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengambil bantuan tunai ke kantor pos dan jumlah dana yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan bantuan yang diberikan sebesar Rp. 300.000 dalam waktu 3 (tiga) bulan dalam dua tahap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dilakukan oleh kantor pos Kecamatan Sepaku sebaiknya disesuaikan dengan buku pegangan atau buku panduan yang ada bukan melakukan pendistribusian kartu tanpa melihat prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan mendistribusikan kartu pada saat pencairan dana
2. Sebaiknya dilakukan perbaikan jalan menuju kantor pos tempat pencairan dana untuk kelancaran proses pelaksanaan program bantuan lainnya di waktu yang akan datang sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak mengambil dana bantuan sendiri tanpa memberi kuasa pada orang lain dan sikap antusias masyarakat tidak lagi berkurang karena kondisi jalan yang rusak.

Daftar Pustaka

- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analisy*. Gava Media. Yogyakarta..
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

- Robbins.P, Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi*. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi Politik dan Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, RajaGrafindo. Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS. Yogyakarta.

Dokumen-Dokumen :

- Anonim, 2013. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi (Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Bahan Bakar Minyak)*.
- Anonim, 2013. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Panduan TKSK Sosialisasi dan Implementasi (Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Bahan Bakar Minyak)*.
- Anonim, 2008. Departemen Sosial RI. *Petunjuk Teknis Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk Rumah Tangga Sasaran*.
- Intruksi Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor 01/Dirut/0613 Tentang Pelaksanaan Penugasan Negara PT.Pos Indonesia.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Pelindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Sumber Internet:

- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia (di akses pada Hari Selasa, 22 Januari 2014 Pukul 19:12 WITA)